

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas Negara adalah mensejahterakan seluruh warga Negara atau masyarakat, bukan individu tertentu.¹ Artinya Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, salah satu tanggung jawab Negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, terdapat beberapa model dalam pelaksanaannya menurut Ramlan Subakti yang dikutip oleh Efriza adalah pemusatan fungsi-fungsi Negara dalam struktur Negara dan model yang lain adalah pemencaran fungsi-fungsi Negara kepada organ dan struktur.² Dalam struktur Negara, pemusatan fungsi Negara atau istilahnya sentralisasi yang berarti tugas Negara langsung diatur satu pintu oleh pemerintah pusat termasuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop, dan UKM) yang memiliki sentral pusat satu terpadu, untuk memiliki wewenang terhadap urusan seluruh wilayah. Dengan adanya wewenang tersebut, kementerian dapat merumuskan dan merencanakan kesejahteraan bagi warganya. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹Efriza, "ilmu politik: dari ilmu politik sampai sistem pemerintahan", Bandung: alfabeta, 2013, hlm.62

²*Ibid*, hlm.65

Sesuai dengan ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 mengenai Ekonomi Kerakyatan, disebutkan bahwa misi dari ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan semua kekuatan nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, produktif, maju, memiliki daya saing dan berkelanjutan.

Kesejahteraan memiliki kaitan dengan pemberdayaan terhadap masyarakat, karena pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk terciptanya kesejahteraan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan visi dari pemerintahan Provinsi Jambi yaitu terwujudnya Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional. Dengan misi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop, dan UKM) terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang unggul dan tangguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

Mengenai kesejahteraan erat kaitannya dengan pemberdayaan, dikarenakan wujud pemberdayaan adalah bentuk salah satu terciptanya kesejahteraan yang menjadi hak seluruh masyarakat. Di era globalisasi dengan persaingan usaha yang semakin ketat, di era digitalisasi dan pasca *Covid-19* seperti sekarang ini, dibutuhkan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat tetap *survive* adalah memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya yang

memadai.³ Terkhususnya di Provinsi Jambi UMKM semakin berkembang dari tahun ke tahun dan dapat kita lihat dari data berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah UMKM Se Provinsi Jambi Dari Tahun 2019 – 2021⁴

Wilayah	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	Menengah		Kecil		Mikro	
	2021	2019	2021	2019	2021	2019
PROVINSI JAMBI	2416.00	1140.00	10708.00	14170.00	152373.00	123160.00
KERINCI	125.00	-	1088.00	1290.00	11187.00	30912.00
MERANGIN	13.00	13.00	693.00	677.00	4250.00	2584.00
SAROLANGUN	10.00	35.00	478.00	564.00	3217.00	3739.00
BATANGHARI	25.00	45.00	344.00	1196.00	12427.00	3849.00
MUARO JAMBI	1.00	1.00	459.00	459.00	41645.00	1297.00
TANJUNG JABUNG TIMUR	253.00	249.00	1135.00	1869.00	17658.00	53884.00
TANJUNG JABUNG BARAT	0.00	-	1048.00	1037.00	7342.00	6976.00
TEBO	0.00	233.00	0.00	268.00	1268.00	910.00
BUNGO	290.00	380.00	881.00	2177.00	2216.00	4291.00
KOTA JAMBI	0.00	-	3506.00	3506.00	44307.00	7257.00
KOTA SUNGAI PENUH	1699.00	184.00	1076.00	1127.00	6856.00	7461.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Prov. Jambi 2022

Sesuai dengan penelitian terdahulu dari Ginanjar Prameswara Nugraha (2021) yang berjudul “*Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Jambi dalam Pemberdayaan Bidang Usaha Kuliner*” bahwa dari hasil penelitian tersebut memperoleh peningkatan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah Kota Jambi, dan juga terdapat diversifikasi produk dalam UMKM,

³Helmi Prasetyo Yuwinanto. Pelatihan Keterampilan dan Upaya Pengembangan UMKM Di Jawa Timur. Dialektika, Volume 13. No. 1. 2018. hlm. 80.

⁴Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi. *Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jambi*. 2019-2021

terdapat peningkatan jumlah produksi UMKM dan peningkatan keuntungan UMKM.

Salah satu untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan adalah melalui sektor perekonomian. Dalam sektor perekonomian ini dapat diwujudkan dengan salah satunya cara adalah pemajuan pelayanan di bidang koperasi dan perdagangan sebagai penggerak utama untuk menghadapi globalisasi. Dengan pengembangan dan terobosan DISKOPUKMPERINDAG pembangunan koperasi dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta bercirikan persaingan sehat untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan kewirausahaan, peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPUKMPERINDAG) Kabupaten Bungo memiliki tugas Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian.⁵ Sebab keberadaan UMKM dapat membantu mengatasi pengangguran, hal ini sesuai pernyataan dari salah satu tokoh publik bapak Sandiaga Salahudin Uno mengatakan industri kreatif dan pengembangan UMKM sangat membantu menekan angka pengangguran dan memberi kesempatan lapangan pekerjaan baru. Maka dari itu beranjak dari visi dan misi awal, sebab itu DISKOPUKMPERINDAG Kabupaten Bungo melakukan pemberdayaan UMKM salah satunya membentuk Klinik UKM dan merupakan

⁵ Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo 2021-2026

bentuk dukungan dengan tujuan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat dan berdaya saing.⁶

Klinik UKM merupakan salah satu inovasi strategis yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo sebagai upaya untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejarah berdirinya Klinik UKM pada tahun 2018 ini tidak terlepas dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di daerah tersebut, yang selama ini menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses informasi, minimnya pengetahuan teknis, dan sulitnya mendapatkan pendampingan yang memadai.

Secara historis, perkembangan Klinik UKM di Kabupaten Bungo dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi dan reformasi ekonomi yang mulai berjalan sejak era reformasi 1998, di mana pemerintah daerah diberi ruang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi lokal. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Klinik UKM hadir sebagai wadah yang menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas terkait, lembaga pemerintah, serta mentor ahli di bidang usaha.

Klinik UKM di Kabupaten Bungo berperan sebagai pusat layanan yang memberikan pendampingan teknis mulai dari pengembangan produk, manajemen usaha, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dalam pelaksanaannya, Klinik UKM memanfaatkan jasa mentor yang memiliki keahlian khusus di bidang

⁶ *ibid*

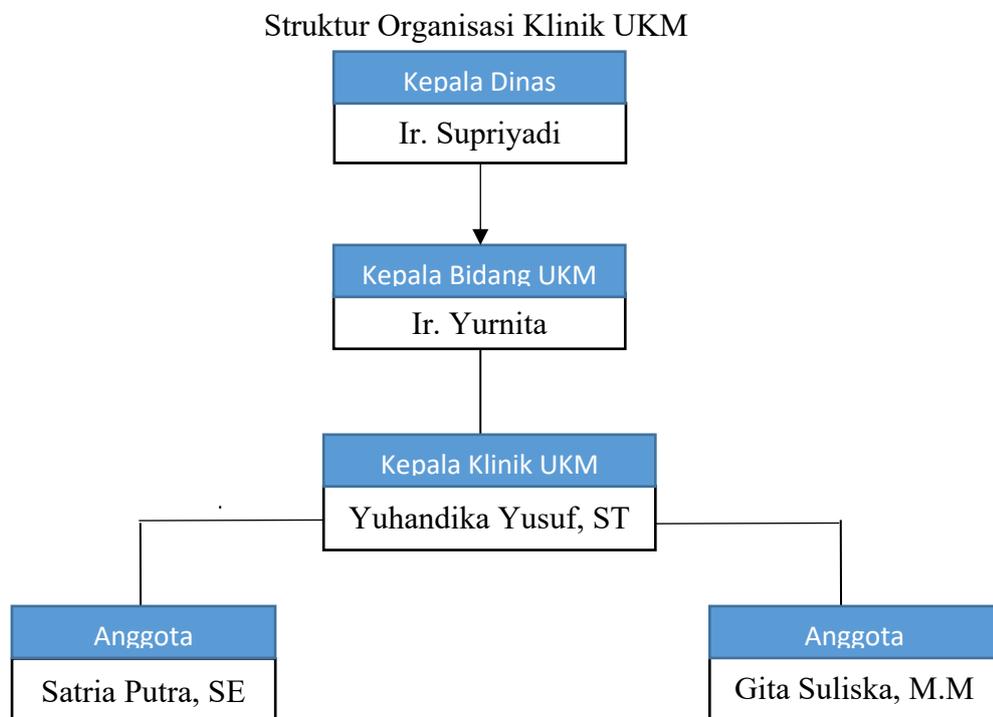
bedah produk, packaging, akuntansi, pemasaran, dan digital marketing. Hal ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan bimbingan yang komprehensif dan sesuai kebutuhan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Seiring waktu, Klinik UKM juga berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sinergi ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengurus aspek legalitas produk, seperti sertifikasi halal, pengurusan hak kekayaan intelektual, dan pencantuman label gizi (Nutrition Facts). Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat posisi UMKM dalam memenuhi standar nasional dan internasional, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.

Secara teoritis, keberadaan Klinik UKM merupakan implementasi dari konsep pemberdayaan ekonomi lokal yang menekankan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses informasi, dan kemudahan layanan pendukung usaha. Klinik UKM juga mencerminkan prinsip good governance dalam pengelolaan program pengembangan UMKM, dengan pendekatan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui Klinik UKM, pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dapat membangun jejaring usaha yang lebih luas serta mendapatkan akses ke sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam perkembangannya, Klinik UKM di Kabupaten Bungo terus berupaya mengatasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kuota pelatihan dan seleksi peserta yang ketat, agar manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak pelaku UMKM. Upaya ini juga didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana serta inovasi dalam metode pelatihan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan.

Dengan demikian, sejarah Klinik UKM di Kabupaten Bungo merupakan perjalanan panjang yang berakar pada kebutuhan pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Klinik UKM telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas, legalitas, dan daya saing produk UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.



Sumber Data: Wawancara Dengan Pendamping UMKM Kab. Bungo

Klinik UKM memiliki tugas ialah:

- 1 Layanan Konsultasi Usaha
- 2 Pendampingan Usaha
- 3 Pelatihan
- 4 Akses Pembiayaan
- 5 Akses Pemasaran
- 6 Pusat informasi Kewirausahaan

Sumber Data: Wawancara Dengan Pendamping UMKM Kab. Bungo

Dengan melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara langsung terhadap UKM kabupaten Bungo agar dapat mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil serta mendapatkan bonus digitalisasi, dimana akses untuk UMKM dalam perizinan dan usaha semakin terbuka lebar serta kembali ke topik awal fungsi dari Klinik UKM, tidak lain dan tidak bukan untuk membantu dalam terobosan transformasi birokrasi. Dalam hal ini Klinik membantu dari hulu sampai hilir agar UMKM naik kelas dan terwujudnya kesejahteraan. Dengan memiliki tugas tersebut, Klinik UKM bertujuan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dan berdampak kepada peningkatan ekonomi, khususnya di kabupaten Bungo. Untuk mencapai tujuan tersebut, Klinik UKM mengadakan pelatihan untuk berbagai macam UMKM yang berada di Kabupaten Bungo.

Tabel 1.2

Tahun	Klasifikasi Usaha UMKM			Jumlah	Tenaga Kerja	Aset	Omset
	Mikro	Kecil	Menengah				
2017	1.846	703	157	2.706	8.118	58.600.000	81.180.000
2018	1.889	740	182	2.811	8.433	59.575.000	84.330.000
2019	2.216	881	290	3.387	10.161	64.825000	101.610.000
2020	2.216	881	290	3.387	2.933	86.911.250	135.788.100
2021	2.504	912	322	3.738	6.789	103.458.098	167.348.342
2022	2.621	1.043	390	4.054	8.384	143.349.751	190.930.989
Jumlah	13.292	5.160	1.631	20.083	44.818	516.719.099	761.187.431

Jumlah UMKM Se Kabupaten Bungo Tahun 2017-2022

Sumber Data : Dinas KOPUKMPERINDAG Kab. Bungo Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa kenaikan jumlah UMKM signifikan di Kabupaten Bungo terjadi pada tahun 2022. Untuk jumlah UMKM di Kabupaten Bungo selama tahun 2016-2022 sebanyak 20.083 UMKM dengan jumlah tenaga kerja 44.818, nilai aset sebanyak Rp. 516.719.099,- dan omset sebanyak Rp. 761.187.431,-

Melalui Kegiatan Klinik UKM bahwasanya pemberdayaan untuk UMKM Sesuai dengan hasil penelitian dari Sahlan Armadi (2022) tentang “*Strategi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin dalam Meningkatkan UKM untuk Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada*

Masa Pandemi” dikarenakan adanya upaya pemberdayaan UMKM oleh pemerintah, masyarakat sudah cukup terbantuan dilihat dari pemerataan pendapatan UMKM yang tidak begitu rendah dan masih bisa menggunakan pendapatan hasil dari produk kerajinan para pelaku usah mikro untuk keperluan sehari-hari dan dalam pemenuhan pokok mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Arif ferdian (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Ukm Di Desa Pompaniki*”. Hasil dari penelitian adalah DISKOPUKMPERINDAG sudah melakukan peranannya dengan baik berbagai upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dapat dikategorisasi secara umum menjadi tiga indikator yaitu menumbuhkan iklim usaha, memfasilitasi bantuan sarana & prasarana kepada UMKM, penyebarluasan informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Memperkuat potensi yang dimiliki, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, memberi desain dan teknologi serta melindungi usaha masyarakat. Hal ini belum ditemukan di lapangan karena persaingan yang terjadi bagi pelaku usaha kecil masih dalam keadaan wajar.

Dalam hasil penelitian dari Nurhalita (2022) Berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di x` Langkat*” dalam upaya pemberdayaan UMKM yaitu:

- 1 Proses untuk melakukan pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat cuman hanya memberikan semangat dan pengarahan kewirausahaan kepada para pelaku usaha. Dan selain itu Dinas Koperasi dan UMKM juga selalu mendampingi para pelaku usaha dan juga koperasi.
- 2 Dalam proses pemberdayaan tidak bisa menjangkau semua para pelaku usaha, sehingga banyak para pemilik usaha yang tidak merasakan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM.
- 3 Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat juga menjalankan berbagai pendataan jumlah pelaku usaha yang masih aktif dan tidak aktif, serta macam-macam usaha, jumlah koperasi yang masih aktif, serta mereka juga melakukan pendataan dan membuat laporan hasil kerja.
- 4 Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan Bank serta Dinas koperasi dan UMKM untuk dapat memberikan bantuan pinjaman KUR bagi para pemilik usaha. Dan mereka juga menjalin hubungan dengan pihak luar untuk dapat meningkatkan keunggulan UMKM.
- 5 Dana yang di keluarkan dari Para Pemerintah Daerah dianggap masih terlalu minim untuk mendukung fasilitas bagi UMKM yang mana dilihat dari pelaksanaannya pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
- 6 Tidak adanya regulasi di daerah yang merencanakan tentang UMKM.

Hal yang dapat ditemukan dari penelitian terdahulu dari Agnesia Hartini (2022) yang berjudul *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan*

Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Sintang” hasil dari penelitian tersebut adalah Ada beberapa tangan yang ditemukan, yakni:

- 1 UMKM mayoritas belum memiliki pembukuan yang akuntabel
- 2 Belum memiliki akses pemasaran yang luas
- 3 Produk yang dihasilkan belum mampu bersaing secara nasional dan internasional
- 4 Sulitnya kondisi geografis yang harus ditempuh
- 5 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi sebagai akibat pendidikan yang juga masih minim
- 6 Manajemen yang belum memadai
- 7 Sistem pelayanan kepada masyarakat relatif rendah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pemberdayaan UMKM maka dari itu judul penelitian “Peran Klinik UKM dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.”

1.2. Rumusan Masalah

Masalah Penelitian diartikan sebagai suatu persoalan yang dapat menuntun peneliti untuk mencari solusinya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti melakukan identifikasi masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

- 1 Bagaimana Peran Klinik UKM Kabupaten Bungo dalam upaya pemberdayaan masyarakat?

2. Apa faktor keberhasilan dan penghambat klinik ukm kabupaten bungo dalam Upaya pemberdayaan Masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan diatas, dalam hal ini sangatlah diperlukan agar bisa menjadi pedoman dalam kegiatan penelitian ini dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui peran klinik UKM kabupaten Bungo dalam upaya pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengetahui faktor keberhasilan dan penghambat klinik UKM kabupaten bungo dalam upaya pemberdayaan Masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis oleh penulis, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan keilmuan dan di harapkan menambah pengetahuan dan wawasan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan membahas peran klinik UKM dalam upaya pemberdayaan UMKM di kabupaten Bungo.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya

pemberdayaan UMKM dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah.

- b. Untuk dapat dijadikan masukan dan saran bagi Klinik UKM kabupaten lain dalam melaksanakan pemberdayaan.

1.5. Landasan Teori

A. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep pemberdayaan masyarakat

Community empowerment yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam, pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Agar memahami konsep dari *empowerment* secara tepat memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya.⁷

Menurut definisinya, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai cara unyuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Artinya keberadaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang berkaitan dengan masyarakat dalam mebanyan keberdayaan masyarakat atau dapat diartikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok maupun masyarakat luar agar mereka dapat memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar yang terkait dapat

⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta cv, Bandung, 2017.

memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya dan aktivitas sosialnya.⁸

Dalam pengertian yang diberikan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya, baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun “kekuasaan atau posisi”. Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan *poverty reduction*. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan.⁹

b. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kutipan oleh Munar Noor, menjabarkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan.¹⁰

Upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) terdiri dari 3 (tiga) aspek pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. *Enabling* merupakan suasana yang dapat memiliki potensi masyarakat dapat berkembang. yang artinya pemahaman bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan atau tidak ada masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan yaitu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan

⁸ Ibid, hlm. 28

⁹ Op cit, Totok Mardikanto hlm. 113.

¹⁰ Munawar Noor, *pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2012), hlm.9

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Enabling merupakan suatu pendekatan strategis dalam pemberdayaan yang berfokus pada penciptaan lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mendukung bagi masyarakat agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri. Dalam perspektif ini, *enabling* memandang bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat termasuk pelaku UMKM memiliki daya dan potensi intrinsik yang apabila difasilitasi secara tepat, dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi produktif.

Dengan kata lain, *enabling* berangkat dari pemahaman bahwa tidak ada masyarakat yang sepenuhnya tanpa daya (*powerless society*), yang ada adalah masyarakat yang belum memperoleh akses, kesempatan, atau dukungan yang memadai untuk mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu, *enabling* mengharuskan adanya intervensi struktural yang bersifat memberdayakan, bukan menggantikan peran masyarakat, melainkan memfasilitasi proses pertumbuhan kapasitas secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *enabling* menjadi landasan penting dalam upaya mendorong kemajuan sektor informal dan semi-formal yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional

maupun lokal. UMKM merupakan representasi dari kekuatan ekonomi rakyat, namun seringkali menghadapi keterbatasan dalam akses modal, teknologi, pasar, serta manajemen usaha. Oleh karena itu, penciptaan iklim yang dilakukan Klinik UKM menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing antar UMKM.

- b. *Empowering* adalah memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat berdaya.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi integral dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara konseptual, pemberdayaan merujuk pada proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya, informasi, dan peluang yang memungkinkan mereka mengendalikan dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Dalam konteks UMKM, pemberdayaan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan, akses terhadap teknologi, permodalan, serta perluasan jaringan pasar.

Pemberdayaan UMKM melalui pendekatan inovasi sosial dan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dapat memperkuat ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dan

memperkuat jejaring antar sektor. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

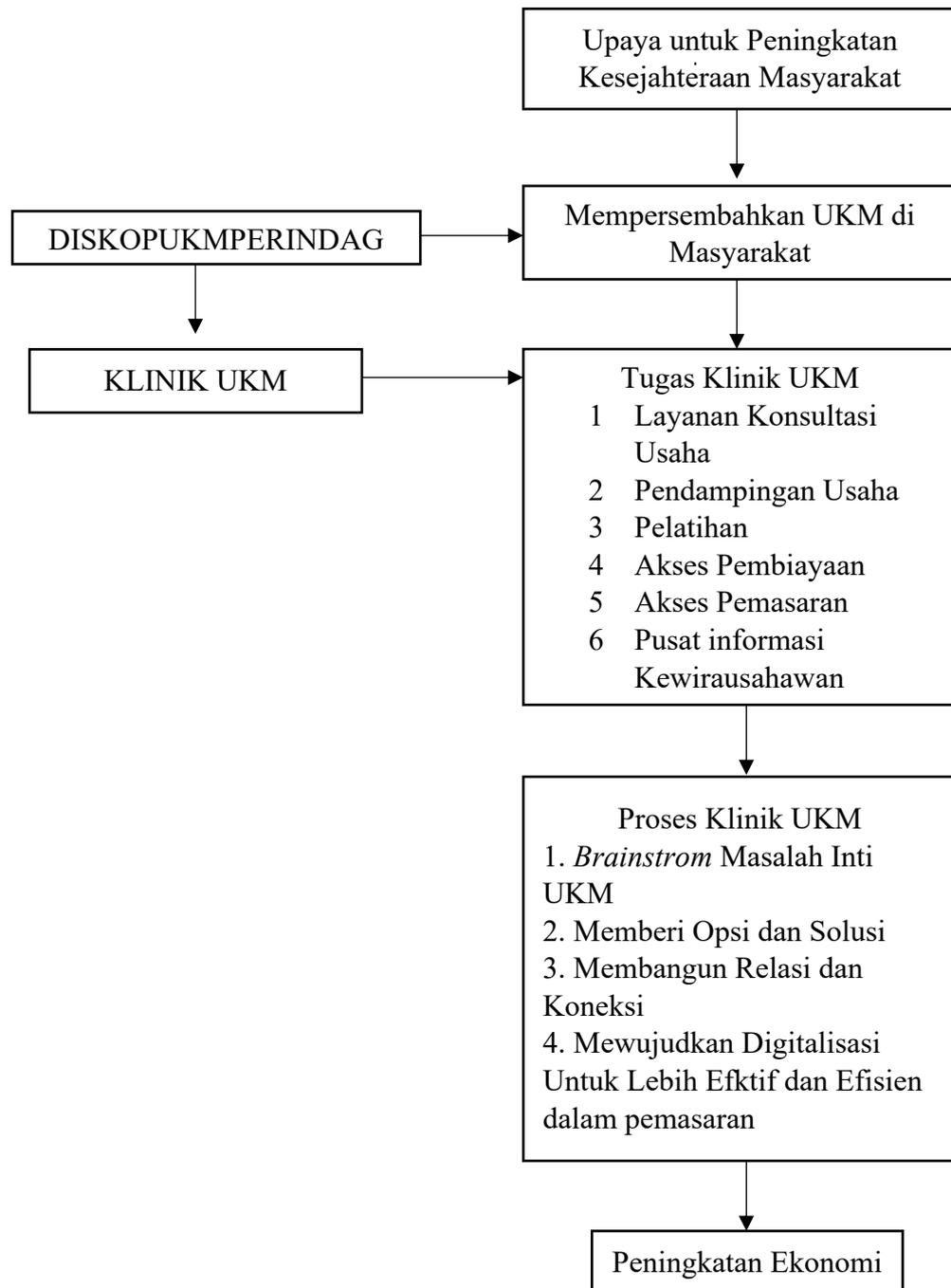
- c. *Protecting* yaitu membela dan melindungi kepentingan masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pengoptimalan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

Konsep *protecting* dalam pemberdayaan masyarakat, yang berarti membela dan melindungi kepentingan masyarakat, memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui perlindungan yang tepat, UMKM dapat berkembang dalam lingkungan yang adil dan berkelanjutan, serta mampu bersaing secara sehat di pasar.

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan, dukungan, dan inovasi yang diperlukan untuk pengembangan UMKM. Pemberdayaan UMKM juga merupakan sarana untuk menumbuhkan budaya demokrasi dalam masyarakat. Melalui keterlibatan dalam proses pengambilan

keputusan terkait pengembangan usaha, masyarakat belajar untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui perlindungan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan UMKM dapat menciptakan lingkungan usaha yang adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal dan nasional. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM melalui pendekatan *protecting* menjadi strategi yang efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

1.6. Kerangka Fikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.¹¹ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹² Atau metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai peran klinik UKM dilakukan di DISKOPUKMPERINDAG Kab. Bungo. Alasan mengambil lokasi, dikarena selaku bahwa seksi permodalan dan hubungan kelembagaan UMKM mempunyai fungsi yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pembinaan dan penyaluran bantuan modal bagi usaha kecil dan menengah melalui klinik UKM.

¹¹Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.

¹²*Ibid*, hlm.4.

1.7.3. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, Spradley dalam Sugiyono menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian mengenai upaya Klinik UKM di dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM.

1.7.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya.

Untuk melakukan penelitian mengenai, Peran Klinik UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bungo. Berikut beberapa informan diantaranya :

1. Kepala Dinas KOPUKMPERINDAG (Ir. Supriyadi)
2. Penanggungjawab Klinik UKM (Yuhandika Yusuf, ST)
3. Perwakilan Binaan Klinik UKM Kabupaten Bungo.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa Teknik untuk mengumpulkan data. Adapun Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Teknik Pengumpulan data dengan observasi adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.¹³

b. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm.254

¹⁴ *Ibid*.

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informan dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, email).¹⁵

Sumber data dan dokumen pada penelitian diperoleh dari pengamatan, jurnal penelitian terdahulu, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta koran maupun artikel dari sumber terpercaya.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir. Dalam analisis data, peneliti perlu

¹⁵*Ibid*, Hlm. 255.

“memisahkan” data¹⁶, suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan bagian-lainnya.¹⁷

1.7.7. Keabsahan Data/Triangulasi

Ada empat tipe Triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu, triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori dan triangulasi teknik metodologis.¹⁸ Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Data, data didapat dari informan melalui dokumentasi, wawancara dan observation. Data diperoleh dari laporan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
2. Triangulasi Teori, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto karena peneliti merasa mampu memberikan penafsiran yang jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁶Guest, Macqueen & Namey, dalam Creswell, John W, “*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hlm. 261.

¹⁷Creswell, John W, “*Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hlm. 261.

¹⁸Pahrudin et.al. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jambi, hlm. 19.